

IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH ANAK JALAN DI KABUPATEN MIMIKA

Samuel Nakoh

NPP. 29.1828

Asdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: samuelnakoh.sn@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This thesis is entitled "Implementation of the Social Service Program in Handling Street Children Problems in Mimika Regency".

Purpose: The purpose of the researcher carrying out this research is as a manifestation of the theoretical and practical application of the knowledge that the researcher has while studying at the Institute of Domestic Administration. **Method:** In this study, the authors use research that is classified as descriptive research, namely research conducted with the aim of describing and describing the objects and phenomena studied. In collecting the author's data using interviews, observations and documentation conducted by the author in early 2022 in the area amid the COVID-19 pandemic situation, this research was carried out in Mimika Regency, Papua Province.

Result: The results of the research conducted by the authors show that the handling of street children in Mimika Regency is still not optimal due to several obstacles, namely from insufficient or non-existent budgeting for handling street children, and also human resources who are ready to always go down in the field to embrace street children. **Conclusion/Sugegestion:** The advice from the author is: First, the Mimika district government should pay more attention to these street children because on average these street children are school-age children who should receive a proper education. Second, with regard to human resources, the Social Service should cooperate more by involving more agencies and other social organizations so that the handling of street children is more accommodated and the problems of street children can be resolved with the social service and organizations that are really in charge of dealing with the problem of street children.

Keywords: street children, Handling street children, Social Service

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan Di Kabupaten Mimika”. **Tujuan:** Tujuan peneliti melaksanakan penelitian ini adalah sebagai sebagai wujud dari penerapan secara teoritis dan praktis atas pengetahuan yang peneliti miliki selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. **Metode:** Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang tergolong sebagai penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan wawancara, obeservasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis pada awal tahun 2022 didaerah ditengah situasi pandemic covid 19, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak jalanan di kabupaten mimika masih belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan yaitu dari penganggaran yang kurang atau tidak ada untuk penanganan anak jalanan, dan juga tenaga SDM yang siap untuk selalu turun dilapangan untuk merangkul anak anak jalanan. **Kesimpulan dan Saran:** Saran dari penulis adalah Pertama, pemerintah kabupaten mimika harusnya lebih memperhatikan kembali anak anak jalanan ini karena rata rata yang menjadi anak jalanan ini merupakan anak anak umur sekolahan yang harusnya mendapat pendidikan yang layak malah sebaliknya mereka lebih memilih turun ke jalan melakukan aktifitas yang tidak semestinya anak anak umuran seperti mereka lakukan Kedua,terkait SDM harusnya Dinas Sosial lebih bekerjasama dengan melibatkan lebih banyak instansi dan organisasi sosial lainnya agar penanganan anak jalanan lebih terakomodir dan permasalahan anak jalanan ini dapat terselesaikan dengan dinas sosial dan organisasi yang benar benar bertugas menangani masalah anak jalanan ini.

Kata Kunci: *Anak jalanan, Penanganan anak jalanan, Dinas Sosial*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan anugrah Tuhan yang harus dilindungi setiap saat, karena di dalamnya terdapat fitrah yang melekat, suatu warisan yang melekat pada harkat dan martabat manusia serta harus dilindungi. Setiap anak memiliki hak, mengingat keterbatasan fisik dan intelektual mereka. Namun saat ini banyak anak yang seharusnya mendapat kasih sayang orang tua malah menjadi anak jalanan. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang semakin jauh bergeser. Pergeseran nilai dan sikap anak-anak dan remaja telah terjadi dan tampaknya sulit untuk dibendung dan diatasi. permasalahan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya menurun terhadap penerapan norma dan nilai. Di Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang juga cukup padat, bahkan dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Sehingga kemiskinan meningkat, dan pengangguran ada dimana-mana, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka

kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021. Akibatnya, ada 27,54 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan hingga kuartal pertama tahun 2021. Ukuran penduduk miskin ini mengacu pada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2021, dengan batas pendapatan Rp 472.525 per kapita per bulan. Hal inilah yang membuat permasalahan anak jalanan menjadi permasalahan yang semakin kompleks. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Di beberapa kota yang padat penduduk dan banyak keluarga bermasalah membuat semakin banyak anak yang kekurangan gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kehilangan hak bermain dan hidup sehingga munculnya kehidupan anak jalanan. Anak jalanan adalah istilah yang merujuk pada anak-anak tunawisma yang tinggal di kawasan jalanan dan anak atau seseorang yang merasa rumahnya kurang nyaman untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga lebih memilih untuk turun ke jalan. Salah satu masalah krusial dari meningkatnya jumlah anak jalanan adalah banyak dari mereka yang berusia antara 4 hingga 18 tahun. Mereka berada di jalan untuk hidup bebas, melarikan diri dari keluarga atau rumah atau untuk mencari penghasilan tambahan keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran dan lain-lain. Hidup di jalanan adalah pilihan bagi mereka, meski penuh resiko. Sebenarnya jalanan bukanlah tempat yang aman untuk anak-anak. Hidup di jalanan penuh dengan resiko ditusuk, dirampok, dieksploitasi, bahkan pelecehan dan kekerasan seksual tidak bisa dihindari, karena kehidupan jalanan seperti hukum rimba, dimana yang kuat berkuasa. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Maka apapun kondisinya anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam perkembangannya, Undang-Undang tentang

Kesejahteraan Anak, sering juga terabaikan dalam praktek penegakan hukum. Padahal undang-undang tersebut belum dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Berkaitan juga dengan perlindungan terhadap anak didalam sistem hukum pidana di indosesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. dalam kandungan.” Maka apapun kondisinya anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam perkembangannya, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, sering juga terabaikan dalam praktek penegakan hukum. Padahal undang-undang tersebut belum dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Berkaitan juga dengan perlindungan terhadap anak didalam sistem hukum pidana di indosesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu dari beberapa kota yang tidak lepas dari permasalahan anak jalanan atau lebih dikenal dengan anak Aibon di Kabupaten Mimika karena kebiasaan menghirup lem Aibon. Di Kabupaten Mimika, saat ini diperkirakan ada 800 anak jalanan atau aibon yang terdaftar di dinas sosial Kabupaten Mimika. Faktor penyebab jatuhnya anak jalanan, selain kondisi ekonomi keluarga yang buruk atau tekanan kemiskinan, juga masalah anak jalanan atau mereka (anak jalanan atau Aibon) tidak nyaman dalam kehidupannya. rumah atau di rumah. Melihat kondisi yang dialami oleh anak jalanan atau anak asal Aibon tersebut, maka pemerintah Pemkab Mimika berusaha untuk mengikutsertakan anak jalanan atau Aibon melalui Dinas Sosial Pemkab Mimika untuk mengiriskan mereka ke BLK Makassar (Pusat Diklat Profesional) atas kreativitasnya. dan bakat untuk dilatih. masalahnya kebanyakan anak jalanan atau aibon telah terkontaminasi atau terintegrasi dengan lingkungan mereka, seperti kehidupan malam dan lain-lain sehingga tetap menjadi masalah ketika mereka mau diajak oleh dinas sosial

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Fauzi Rahman judul penelitian Model Penanganan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya metode yang digunakan metode kualitatif dan deskriptif Hasil penelitiannya yaitu Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2007 belum dilaksanakan secara maksimal hal ini berhubungan dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang kurang memadai dan Penanganan anak jalanan dalam teori dramaturgi memaparkan peran dari petugas sebagai pembina sekaligus pengasuh anak jalanan dapat menjadi jenis alternatif dalam merubah perilaku anak jalanan. Selanjutnya penelitian yang kedua dari Febrianti Rosalina, Vita Puspa Ningrum Cahyani, Violita Ramadhanti Putri judul penelitiannya Penyalahgunaan Lem Aibon Bagi Anak-Anak Di Kota Sorong Papua Barat metode yang digunakan yaitu kualitatif dan deskriptif hasil penelitiannya adalah penyalahgunaan lem aibon pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor yakni: Faktor Internal dan

Eksternal. Penelitian yang ketiga dari Nur Hidayah, Uswatul Mardiyah judul penelitian yaitu Dampak Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Dibawah Umur dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan hasilnya dapat disimpulkan bahwa anaka-anak pengguna lem Aibon di Kota Sorong menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa situasi yang kurang kondusif di Kota Sorong.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan Di Kabuapten Mimika.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang tergolong sebagai penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011: 52). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu wawancara. Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka, tetapi analisis data pada penelitian ini menggunakan menggunakan kata-kata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis fokus magang yang penulis amati pada Dinas Sosial Kabupaten Mimika yaitu berupa implementasi dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III. Namun sebelum penulis melakukan analisa terhadap kinerja aparatur pemerintahan Dinas sosial Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika merupakan salah satu dari beberapa kota yang tidak lepas dari permasalahan anak jalanan atau lebih dikenal dengan anak Aibon dan anak karton di Kabupaten Mimika karena kebiasaan menghirup lem Aibon dan menjaga tempat tempat parkir. Di Kabupaten Mimika, saat ini diperkirakan ada 800 anak jalanan atau aibon yang terdaftar di dinas sosial Kabupaten Mimika. Faktor penyebab jatuhnya anak jalanan, selain kondisi ekonomi keluarga yang buruk atau tekanan kemiskinan, juga masalah anak jalanan atau mereka (anak jalanan atau Aibon) tidak nyaman dalam kehidupannya. rumah atau di rumah. Melihat kondisi yang dialami oleh anak jalanan atau anak asal Aibon tersebut, maka pemerintah Pemkab Mimika berusaha untuk mengikutsertakan anak jalanan atau Aibon melalui Dinas Sosial Pemkab Mimika untuk mengirimkan mereka ke BLK Makassar (Pusat Diklat Profesional) atas kreativitasnya. dan bakat untuk dilatih. masalahnya kebanyakan anak jalanan atau aibon telah terkontaminasi atau terintegrasi dengan lingkungan mereka, seperti kehidupan malam dan lain-lain sehingga tetap menjadi

masalah ketika mereka mau diajak oleh dinas sosial.

3.1 Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah anak jalanan di Kabupaten Mimika.

Ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang bekerja secara stimulan dan berinteraksi satu dengan yang lain yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut juga penulis temukan di lapangan pada saat melaksanakan program magang dan terlihat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang berjalan. Ke-empat faktor tersebut kemudian penulis analisa dan jabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi ialah perilaku manusia yang dapat merangkum perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Komunikasi dapat diartikan juga sebagai penyampaian komunikator kepada komunikan. Seorang komunikator harus menyampaikan informasi kepada komunikan dengan baik dan jelas, sehinggakomunikan mengerti akan maksud dari berita itu. Informasi dalam organisasi dapat berupa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pimpinan organisasi berupa petunjuk, keterangan umum, perintah, maupun teguran. Agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus di transmisikan kepada personil yang tepat dan perintah yang diberikan juga harus jelas, akurat dan konsisten. Komunikasi terkait anak jalanan sudah terlaksana tetapi belum maksimal karena terkendala dana atau biaya untuk membina anak-anak tersebut di Kabupaten Mimika. Hal ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas perangkat dinas sosial masing-masing agar kebijakan dan program yang diemban dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa komunikasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan publik yang menjadi tujuan dan kebijakan tersebut dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Winarno (2012:179) di dalam Komunikasi terdapat sejumlah indikator yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi untuk menentukan keberhasilan arah kebijakan.

a. Transmisi

Transmisi merupakan suatu komponen yang saling berkesinambungan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu kebijakan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat surat perintah telah dikeluarkan. Tujuan dari Transmisi adalah untuk menyampaikan suatu informasi tentang apa yang akan dilaksanakan, tidak hanya kepada pelaksana juga kepada sasaran program yaitu masyarakat baik disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Berkaitan dengan Transmisi dalam penanganan masalah anak jalanan, Dinas sosial sudah

melakukan komunikasi melalui beberapa upaya kepada seluruh OPD di Kabupaten Mimika yang nantinya akan dilaksanakan oleh pihak terkait. Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Dinas Sosial yang mengatakan bahwa: “Dalam penyaluran informasi sudah dilakukannya pemberitahuan kepada seluruh OPD untuk menata tupoksi melalui rencana kerja agar sesuai dengan target program penanganan masalah anak jalanan melalui rapat evaluasi”. Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi terkait langkah-langkah komunikasi yang dilakukan dan mendapati bahwa: “Melalui Dewan yang terdiri dari semua kepala OPD, dilakukannya bimbingan, sosialisasi ke lapangan langsung dan konsolidasi sebagai upaya penanganan masalah anak jalanan”.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi ini mempunyai tujuan agar program yang ditransmisikan menjadi jelas, sehingga apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari program itu sendiri dapat berjalan sesuai prosedur dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Untuk kejelasan dari informasi tentang penanganan masalah anak jalanan masih tergolong belum memiliki kejelasan, hal ini dikarenakan belum adanya tindak lanjut dari OPD lain untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mimika.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi harus jelas supaya proses penanganan masalah anak jalanan dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif sehingga bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dari beberapa faktor yang menghasilkan komunikasi yang tidak jelas juga menyebabkan komunikasi yang tidak konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik. Dalam setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya itu. Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting bagi implementasi kebijakan. Diperlukan tenaga yang ahli dan relevan dalam ukuran yang tepat. Implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Pentingnya pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan berupa staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan mampu diperhatikan dari faktor sumberdaya yang ada. Tanpa adanya sumberdaya yang berkualitas dan memadai, niscaya implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Menurut Edward III dalam Winarno (2012:184) dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

a. Staf

Dalam implementasi kebijakan adalah staf, winarno (2012:184-185) mengatakan bahwa jumlah staf tidak mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil, hal ini disebabkan oleh pemerintah ataupun staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan. Tingkat kualitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Mimika relatif masih kurang. Walaupun sudah dilakukannya upaya peningkatan kualitas terhadap staf yang ada, tetapi belum memenuhi harapan untuk meningkatnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kesiapan dalam menangani masalah anak jalanan.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi, pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kedua, informasi mengenai data tentang kekuatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa “Tentu kami lakukan, bukan hanya penyampaian kepada para pegawai kami sendiri, tetapi kepada setiap pimpinan OPD ketika ada rapat gabungan. Ini bertujuan agar mereka semua mengingat program apa saja yang harus terselesaikan dan tidak terlantarnantinya.” Hasil wawancara kepala Kepala Bidang Rehabilitasi, menyebutkan bahwa: “kami rutin melakukan rapat di ruangan yang dihadiri oleh seluruh pegawai dinsos, untuk membahas setiap agenda kegiatan yang telah dilaksanakan, proses pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan yang akan ditindaklanjuti kedepannya”.

c. Wewenang

Wewenang, ada dalam bentuk dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Wewenang yang memadai seringkali langka terutama dalam hal mengatur personil-personil lain. Pada saat lain, para pelaksana mempunyai wewenang formal, tetapi dibatasi dalam penggunaannya. Kurangnya wewenang yang dimiliki oleh seorang pimpinan menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat. Pemberian kewenangan juga dilakukan dalam penanganan masalah anak jalanan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika memiliki wewenang untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut. wewenang yang diberikan Kepala Dinas Sosial belum berjalan dengan baik sesuai dengan Nota

Kesepahaman maupun Keputusan Bupati yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sejumlah Pegawai lain masih sendirisendiri tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan sumber penting dalam implementasi seorang pelaksana, mulai dari mempunyai staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi. Tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Perihal mengenai fasilitas dalam penanganan masalah anak jalanan, kekurangan fasilitas menjadi salah satu indikator yang menandakan bahwa pemenuhan dari segi fasilitas masih kurang.

3. Bina Lingkungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak biasa terjadi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Hal yang penting dan perlu dicermati adalah pada faktor pengangkatan birokrat sertaintensif.

a. Pengangkatan Birokrat

Haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan. Struktur birokrat yang ada dalam Dinas Sosial sudah baik, walaupun tidak seluruh pegawai yang ada memiliki kompetensi yang mumpuni.

b. Penggunaan pestisida

Umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka diperlukan manipulasi intensif agar orang dapat bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan yaitu dengan cara menambah biaya tertentu sehingga mendorong para pelaksana untuk melaksanakan perintah dengan baik. Menurut Edward III dalam Winarno (2012:201) “salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi intensif-intensif”. Oleh karena itu intensif para pemberi kebijakan akan mempengaruhi pekerjaan pelaksana kebijakan. Intensif diberikan oleh atasan agar bawahan mampu lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki keinginan untuk memperbaiki prestasinya setiap hari dalam bekerja secara nyata. Intensif yang diberikan kepada para staf sudah bagus dan memberi dampak dimana staf bekerja dengan rajin. Dinas Sosial selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat maupun menyediakan pelayanan Dinas Sosial kepada Pegawai yang membutuhkan dengan menunjukkan kualitas, kemampuan dan ketanggapan pegawai yang ada.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi merupakan hal yang penting dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi, yaitu:

a. Standar Operating Prosedur (SOP)

Standar Operating Prosedur (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya SOP diharapkan bisa menjadi pedoman bagi setiap implementor yang telah mendaftar dalam menjalankan kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mekanisme, waktu penyelesaian dan persyaratan sudah ditetapkan disana, jadi dalam pelaksanaannya masyarakat sudah mengetahui waktu penyelesaian dari permohonan yang diajukannya. Standar Operating Prosedur (SOP) yang dimiliki Dinas sosial Kabupaten Mimika sudah ada, sehingga masyarakat mampu membantu menangani masalah anak jalanan di kabupaten mimika.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Program Dinas Sosial dalam Penanganan masalah anak jalanan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

1. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Dinas Sosial dalam penanganan masalah anak jalanan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Program dinas sosial dalam penanganan masalah anak jalanan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua memiliki faktor internal maupun eksternal dalam penerapannya, antara lain:

a) Internal

- **Komitmen Pemerintah**

Dinas Sosial selalu melakukan komunikasi dan koordinasi antar OPD, hal ini bertujuan agar seluruh perangkat pemerintahan mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. beberapa pelayanan publik yang dilaksanakan dari dinas sosial juga terus dijalankan agar mencapai tujuan. Dinas sosial selalu terbuka dan terus berkoordinasi dengan seluruh OPD agar dapat mempercepat pengintegrasian dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, hal ini bertujuan demi pelayanan publik yang lebih mudah dan murah demi masyarakat yang membutuhkan.

b) Eksternal

- **Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu menangani masalah anak jalanan. Walaupun seluruh sumber daya yang diperlukan telah terpenuhi, tetapi jika tidak ada pemahaman dari masyarakat maka akan menghambat penanganan masalah anak jalanan karena tujuannya tidak mampu tercapai. Menurut Kepala Dinas Sosial yang mengatakan bahwa: “Masyarakat yang berada di kabupaten Mimika juga terlibat aktif sebagai pendukung penanganan masalah anak jalanan, karena percuma menangani masalah anak jalanan itu ada tapi tidak digunakan oleh masyarakat yang langsung terlibat dengan anak-anak jalanan.

3.3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Dinas Sosial Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Program Dinas Sosial Kabupaten Mimika Provinsi Papua memiliki faktor internal maupun eksternal dalam penerapannya, antara lain:

a) Internal

- **Anggaran**

Untuk sementara memang pendanaan anggaran dalam mendukung pengembangan program penanganan masalah anak jalanan masih diberikan anggaran. Namun anggaran yang diberikan untuk mengatasi Masalah Anak Jalanan masih minim atau kurang maka sampai saat ini dari pihak dinas sosial hanya memberikan pendataan dan nasehat kepada anak-anak jalanan. Menurut hasil wawancara Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa: “Kami sebagai dinas Terkait untuk menjalankan program ini masih sulit dalam menjalankannya karena terkendala dengan biaya atau anggaran sehingga kami sampai saat ini hanya masih melakukan pendataan saja terhadap anak-anak ini” Dengan ini penulis mampu menarik kesimpulan bahwa dari segi anggaran, Kabupaten Mimika memiliki anggaran yang mampu menunjang penanganan masalah anak jalanan namun untuk program penanganan masalah anak jalanan sendiri yang belum mendapatkan anggaran atau masih kurang biaya untuk melakukan penanganan anak jalanan ini.

- **Eksternal**

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam implementasi penanganan anak jalanan di kabupaten Mimika telah memiliki fasilitas yang cukup memadai. Seperti yang telah disebutkan di atas fasilitas yang dimiliki guna menunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini di antaranya mempunyai balai rehabilitasi baik yang ada di Daerah maupun di pusat. Selanjutnya ada juga transportasi atau unit kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi para agen pelaksana dalam melakukan sosialisasi kepada anak

jalanannya maupun kepada masyarakat. Contoh lain fasilitas yang dimiliki adalah adanya tempat penampungan sementara untuk 14 anak-anak jalanan, baik itu milik pemerintah Kabupaten Mimika maupun milik yayasan atau lembaga yang peduli tentang anak jalanan dan pengentasannya. Dengan adanya tempat penampungan sementara tersebut akan memudahkan dalam melakukan pembinaan maupun pelatihan terhadap anak jalanan. Meskipun sumber daya sarana prasarana memadai namun tidak di tunjang dengan sumber daya yang lebih utama yaitu sumber daya manusia finansial dan sumber daya manusia maka faktor sumber daya tersebut bisa dikatakan tidak optimal sehingga menjadikan implementasi penanganan anak jalanan juga belum optimal. Faktor penghambat selanjutnya adalah struktur birokrasi. Faktor ini berkaitan dengan pola koordinasi dan SOP (standar Operasional Prosedur) para aktor pelaksana kebijakan. pola koordinasi kebijakan penanganan anak jalanan di kabupaten Mimika melibatkan beberapa instansi dan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. namun dalam prakteknya koordinasi yang dilakukan belum cukup baik diantara lembaga pemerintah dengan instansi lain maupun dengan yayasan anak jalanan. Kemudian SOP dalam koordinasi tersebut juga belum ada sehingga para lembaga menjalankan usahanya dalam menangani anak jalanan di kabupaten Mimika berjalan sendiri-sendiri

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dinas Sosial selalu melakukan komunikasi dan koordinasi antar OPD, hal ini bertujuan agar seluruh perangkat pemerintahan mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. beberapa pelayanan publik yang dilaksanakan dari dinas sosial juga terus dijalankan agar mencapai tujuan. Dinas sosial selalu terbuka dan terus berkoordinasi dengan seluruh OPD agar dapat mempercepat pengintegrasian dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, hal ini bertujuan demi pelayanan publik yang lebih mudah dan murah demi masyarakat yang membutuhkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis melakukan pengambilan kesimpulan terkait Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan di Kabupaten Mimika, Penulis menyimpulkan bahwa :

❖ Komunikasi

Terkait anak jalanan sudah terlaksana tetapi belum maksimal karena terkendala dana atau biaya untuk membina anak-anak tersebut di Kabupaten Mimika. Hal ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas perangkat dinas sosial masing-masing agar kebijakan dan program yang diembankan dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa komunikasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, serta kelompok

sasaran kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan publik yang menjadi tujuan dan kebijakan tersebut dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

❖ **Terkait SDM**

Yang membuat dinas sosial sangat membutuhkan sumber daya yang rata-rata minimal bagus dan jumlahnya cukup terakomodir, dan memang harus berupaya melalui beberapa pendidikan peningkatan kualitas, sehingga kita harapkan dari sekian sumber daya/potensi ini mampu kita kembangkan untuk membantu menangani permasalahan anak-anak jalanan ini.

❖ **Terkait Anggaran**

Untuk sementara memang pendanaan anggaran dalam mendukung pengembangan program penanganan masalah anak jalanan masih diberikan anggaran. Namun anggaran yang di berikan untuk mengatasi Masalah Anak Jalanan masih minim atau kurang maka sampai saat ini dari pihak dinas sosial hanya memberikan pendanaan dan nasehat kepada anak-anak jalanan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Program Pekarangan Pangan Lestari Di Kota Pekanbaru.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan Di Kabupaten Mimika

V. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. **DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku-buku:

Alphabeta., S. (. (n.d.). *Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alphabeta.*

Dr.Dedeh Maryani, M. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat. Indonesia : deepublish.*

- Kabain, H. A. (2020). *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*. Indonesia: Alprin.
- Munir, B. (2012). *SIX DIMENSION ORGANIZATION dengan Pendekatan Organization Development*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia*. Indonesia : Ardi Gunawan.
- Rohidi, T. (1993). *Pola pendidikan keluarga anak jalanan keluarga miskin di Semarang*. Semarang, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Shalahuddin, O. (2004). *Di bawah bayang-bayang ancaman: dinamika kehidupan anak jalanan*. Indonesia: Yayasan Setara.
- Sugito, Y. (2013). *Metodologi Penelitian* . Indonesia : Universitas Brawijaya.Press.

B. Dasar Hukum Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

- Gumanti, L. P. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(1).
- Nur Hidayat, U. M. (2019). Dampak Penggunaan Lem Aibon pada Kalangan Anak dibawah Umur. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4.2, 17-30.
- Rahman, F. (2020, february). MODEL PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA. *Volume 2 Nomor 1*, 61-69.
- Ramadhani, E. &. (2019). Pelaksanaan konseling pada anak jalanan. . *Wahana dedikasi*, 2(1).
- Rosalina, F. C. (2019). Penyalahgunaan Lem Aibon Bagi Anak-Anak Di Kota Sorong Papua Barat . *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 1(1), 1-12.

D. Sumber Lain

- [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details. \(/120628\).](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details. (/120628).) Retrieved from /pp-no-59-tahun-2019.
- [https://08.html?m=1. \(2020\).](https://08.html?m=1. (2020).) Retrieved from www.salampapua.com/800-anak-jalanan-di-timika-karena.
- [https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/.](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/) (n.d.). Retrieved from hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia.
- [https://papua.antaranews.com/berita/496523/.](https://papua.antaranews.com/berita/496523/) Retrieved from dinsos-mimika-perkiraan-anak-jalanan-di-timika-capai-seribuan-orang.

<https://www.merdeka.com/uang/>. Retrieved from [data-bps-jumlah-orang-miskin-di-indonesia-mencapai-275-juta.html](https://www.bps.go.id/data-bps-jumlah-orang-miskin-di-indonesia-mencapai-275-juta.html).
<https://mimikab.bps.go.id/publication/2021/02/26/aa565ea44bf03d8c8d3a9a91/kab-upaten-mimika-dalam-angka-2021.html>